**Sinergi Pemerintah Daerah dan Komando Kewilayahan TNI AD Dalam Membangun Kawasan Perbatasan Negara**

**NKRI-RDTL**

**Yudi Rusfiana**

**Udaya Majid**

***ABSTRACT***

*Building border areas is a government duty, including local government. Conditions at the border of the state require acceleration to continue to be built so that it really becomes the front porch of the Unitary Republic of Indonesia. It takes approaches in doing so, such as welfare and security approaches because with the guarantee of security in the border area of ​​development can take place with conducive.To implement such approaches in the framework of development in the border regions of the country, synergies are required between the local government and the TNI through the Kowil Apparatus in the border areas. Therefore this paper focuses on how the synergy between the Regional Government and the TNI Kowil Apparatus in developing the NKRI-RDTL Border Area. The research method used is qualitative method with literature study techniques or literature review, documentation and other descriptive techniques.The results show that the synergy between the local government and the TNI has a high urgency to do. Synergy can be done through collaboration in the implementation of tasks and functions and cooperation, especially in the implementation of infrastructure development involving the strength and potential of the Regional Command Apparatus either through involvement in aspects of human resources and infrastructure facilities in various activities bhakti TNI or in activities which then synergized by the government area.With the synergy of the development in the border area can be achieved optimally so that in the end can improve the welfare of the people integrally while supporting the performance of the local government and the TNI itself as an integral part of the Unitary Republic of Indonesia.*

*Keywords: Synergy, Local Government, Regional Command, State Border Area*

**ABSTRAK**

Membangun kawasan perbatasan negara merupakan tugas pemerintah, termasuk didalamnya pemerintah daerah. Kondisi di kawasan perbatasan negara memerlukan akselerasi untuk terus dibangun sehingga benar-benar menjadi beranda terdepan NKRI. Dibutuhkan pendekatan-pendekatan dalam melakukan hal tersebut, diantaranya pendekatan kesejahteraan dan keamanan karena dengan terjaminnya keamanan di kawasan perbatasan pembangunan dapat berlangsung dengan kondusif.

Untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan tersebut dalam kerangkan pembangunan di kawasan perbatasan negara diperlukan sinergi antara Pemda dengan TNI melalui Aparat Kowil di kawasan perbatasan. Karena itu tulisan ini memfokuskan kepada bagaimana sinergi Pemda dan Aparat Kowil TNI dalam membangunan kawasan Perbatasan NKRI-RDTL. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi pustaka atau kajian literatur, dokumentasi dan teknik deskriptif lainnya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sinergi antara Pemda dengan TNI memiliki urgensitas tinggi untuk dilakukan. Sinergi tersrbut dapat dilakukan melalui kolaborasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kerjasama terutama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan kekuatan dan potensi Aparat Komando Kewilayahan baik melalui pelibatannya dalam aspek Sumber daya manusia maupun sarana prasarana dalam berbagai kegiatan bhakti TNI maupun dalam kegiatan yang kemudian disinergikan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya sinergi tersebut pembangunan di kawasan perbatasan dapat dicapai dengan optimal sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara integral seraya mendukung kinerja Pemda dan TNI itu sendiri sebagai bagian utuh tak terpisahkan dari NKRI.

Kata Kunci: Sinergi, Pemerintah Daerah, Komando Wilayah, Kawasan Perbatasan Negara

**Pendahuluan**

Pembangunan kawasan perbata-san negara merupakan bagian dari pembangunan nasional secara umum. Membangun kawasan perbatasan memerlukan perhatian dari semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah yang lebih fokus sehingga terjadi peningkatan kualitas dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan secara umum mencakup kondisi geografis dan topografi wilayah; permasalahan yang berdimensi lokal berupa kemiskinan; Infrastruktur; permasalahan yang berdimensi nasional berupa kegiatan ekonomi ilegal; dan permasalahan yang berdimensi regional seperti kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, serta pergeseran garis tapal batas; dan permasalahan berdimensi ekonomi, serta maraknya penyelundupan dan pemasaran yang berorientasi ke luar. Karena itu membangun kawasan perbatasan negara seperti halnya di Kawasan perbatasan NKRI-RDTL memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh, koordinasi dan sinergi dari berbagai pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah didistribusikan kewe-nangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Pengelola dalam mengelola kawasan perbatasan. Karena itu pengelolaan kawasan perbatasan negara menjadi kewenangan yang konkuren artinya melibatkan semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah.

Gambar 1

Peta Perbatasan NKR-RDTL



Sumber: Sindonews.com Didownload Pada Tanggal 2 November 2017

Diantara berbagai permasalahan yang ada di kawasan perbatasan NKRI-RDTL tetapnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya pembangunan infrastruktur yang masih belum terselesaikan dan maraknya aktivitas illegal serta jaminan keamanan yang memerlukan kondusifitas kewilayahan yang stabil.

Terdapat penelitian yang membahas persoalan pembangunan di kawasan perbatasan antara lain Agus Mulyana dalam Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjungpura Vol 2, No 4 (2013) dengan artikel Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia Dengan Negara Malaysia Di Wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu melalui pendekatan hukum dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi bagian integral dari RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Badau merupakan kawasan yang memiliki sumber daya unggulan potensial untuk dikembangkan mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan. Posisi strategis Badau di wilayah perbatasan negara yang memiliki akses langsung dengan negara bagian Srawak Malaysia Timur merupakan faktor pendorong (push factor) bagi perkembangan perekonomian di Kecamatan Badau dan sekitarnya, menuju terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

Artikel tersebut, secara substantive melihat pembangunan di kawasan perbatasan negara dari aspek hukum sehingga rekomendasi yang dihasilkannya adalah agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dengan mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dapat dilakukan yudisial review kepada Mahkamah Agung karena bertentangan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara atau Batal Demi Hukum.

Tulisan artikel tersebut sangat berkontribusi dalam menelaah berbagai peraturan terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Namun yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mensinergikan kewenangan penge-lolaan kawasan perbatasan guna membangun kawasan perbatasan yang lebih maju sebagai beranda terdepan NKRI.

Sinergi begitu urgent secara konntekstual dalam membangun kawasan perbatasan negara terutama sinergi yang harus terbangun antara Pemerintah Daerah dan Aparat Komando Kewilyahan TNI AD karena dua institusi tersebut berada pada level operasional dan hadir sebagai representasi negara di kawasan perbatasan yang marus melaksanakan pembangunan dengan berbagai pendekatan baik kesejahteraan maupun keamanan guna menjamin keberlang-sungan pembangunan dan keutuhan NKRI.

Karena itu dalam artikel ini akan di bahas keadaan pembangunan di dalam cakupan lingkup kawasan perbatasan Indonesia, khususnya yaitu perbatasan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), menggambarkan situasi dan kondisi sesungguhnya yang terjadi di perbatasan tersebut, serta berupaya menghubungkan atau mencari keterhubungan antara sinergi yang terjalin antara Pemerintah Daerah dengan TNI melalui Aparat Kowil yang bertugas guna meningkatkan pembangunan di daera perbatasan tersebut. Berbagai faktor kunci, unsur, dan berbagai elemen tertentu turut dihadirkan di dalam tulisan ini untuk dapat menggambarkan situasi yang terjadi apa adanya serta berupaya guna menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Tujuan yang ditetapkan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinergi yang terbangun dan terjadi antara Pemda dengan TNI melalui Komando Wilayah (Kowil) di kawasan perbatasan NTT-Timor Leste serta mengetahui bagaimana hal tersebut dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan yang terjadi di daerah perbatasan tersebut. Sedangkan manfaat atas penulisan karya ilmiah ini diantaranya adalah untuk dapat memberikan sumbangsih teoritis maupun praktis bagi para pengambil kebijakan di tingkat daerah hingga bila dimungkinkan untuk menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun TNI dalam upaya perumusan kebijakan di masa yang akan datang.

Permasalahan yang berusaha dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Sinergi Pemda dan Aparat Kowil TNI AD Dalam membangun kawasan Perbatasan NTT-Timor Leste?

**Tinjauan Konseptual**

Kawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, secara secara nasional kawasan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan. (Moeldoko, 2010 h.3).

Kondisi kawasan perbatasan semula hanya berupa garis dalam sebuah peta, atau tanda batas politik (*security check points, passport control, transit points*) mengalami perkembangan ke arah dimensi yang lebih luas, sehingga nuansa *borderless* semakin terlihat dan mendorong aspek *prosperity*/kesejahteraan dan keamanan atau *human security* untuk dikembangkan, sehingga fungsi kawasan perbatasan menjadi penting sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi (kawasan strategis) meskipun seringkali terletak di wilayah pinggiran/*periphery.*

Pembangunan kawasan perbata-san menjadi agenda yang sensitif karena menyangkut masalah politik dan berdimensi memicu ketegangan bilateral antara dua negara. fungsi dari kawasan perbatasan terbagi menjadi bebrapa komponen yang saling keterkaitan dan memiliki porsi penting. Pentingnya fungsi kawasan perbatasan tersebut dikarenakan kawasan perbatasan haruslah menjadi wajah dari sebuah negara, sehingga selain berfungsi sebagai garis pembatas suatu negara. Sebuah kawasan perbatasan memiliki fungsi sebagai simbul identitas dan fungsi fiskal yang berkaitan mengenai keuanagan negara serta kontrol pemerintah dalam kegiatan di kawasan perbatasan.

**Tabel 1**

**Fungsi Kawasan Perbatasan Menurut Guo dan Van Well**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Guo (2005) | No | Van Well (2006) |
| 1 | Sebagai Fungsi legal, dimana garis perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan negara; | 1 | Sebagai barriel/pembatas, yaitu membagi secara jelas mengenai aspek ekonomi, administrasi, hukum, kedaulatan dan psikologi; |
| 2 | Sebagai fungsi kontrol dimana tercatatnya setiap kegiatan diperbatasan sebagai kontrol pemerintah | 2 | Sebagai jembatan, fungsinya adalah menjembatani sebuah program/jaringan strategis, peningkatan kapasitas; |
| 3 | Sebagai fungsi fiskal, berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara | 3 | Batas sumber daya (resources), yaitu adanya kesempatan ekonomi dan politis dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah; |
|  |  | 4 | Sebagai simbol identitas, lembang identitas suatu wilayah/bangsa/negara. |

(Sumber: Guo (2005); Van Well (2006) dikutip oleh Kurniadi (2009:32)

Stephen B. Jones dalam Sutisna (2010:12) merumuskan teori yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan kedalam ruang lingkup 1) Alokasi (*allocation*); 2) Delimitasi (*delimination*); Demakrasi (*demakration*) dan 3) dministrasi (administration).

Sehingga ulasan konseptual diatas menekankan perwujudan kawasan perbatasan sebagai beranda depan yang berorientasi pada aspek kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) yang dilakukan oleh berbagai pihak baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Secara vertical maupun horizontal hal ini terkait focus konsentrasi kerja Presiden RI Ir Joko Widodo dan seluruh perangkat pemerintahan, termasuk TNI didalamnya. Bentuk konkret program Nawacita Presiden RI Ir. Joko Widodo sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat. Begitu juga untuk pembangunan pertahanan di wilayah perbatasan. Keterlibatan TNI dalam ranah perbatasan adalah prinsip dan sangat diperlukan, karena bagaimanapun kehadiran TNI ditengah-tengah masyarakat merupakan sebagai perekat dan pemersatu kekuatan yang andal dari ancaman pihak musuh.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa yang masih menjadi persoalan dalam membangun kawasan perbatasan negara di NKRI-RDT tepatnya di Provinsi NTT adalah pembangunan Infrastruktur, maraknya aktivitas illegal dan jaminan keamanan. Karena itu diperlukan sinergi yang solid antara oemerintah daerah dan aparat Komando Kewilayahan TNI AD.

TNI sangat berkepentingan atas keamanan di Kawasan perbatasan Negara sesuai dengan tugas pokok fungsinya yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Bahwa TNI adalah kekuatan pertahanan negara yang memiliki tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Termasuk menjamin kemanan di kawasan perbatasan dan ikut terlibat dalam pembangunan di kawasan tersebut yang dilaksanakan oleh aparat komando kewilayahah sesuai dengan Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial (2007:10) terdiri dari Kodam, Kodim dan Koramil yang menyelenggarakan Pembinaan Teritorial secara terus menerus, baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya, sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan

Sinergi sangat penting dilakukan, mengingat Sinergi itu sendiri adalah Deardorff dan Williams (2006) *“ Synergy is not something that we can hold in our hand but the Term implies a multiplier effect which allows the energy of individual work or service to multiply exponentially through joint, collaborative effort*. Artinya bahwa Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang oleh tangan kita tapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh *(multiplier effect)* yang memungkinkan energy pekerjaan atau jasa individu berlipat ganda secara eksponensial melalui usaha bersama.

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi pustaka atau studi literatur yang berusaha mengumpulkan berbagai data kolektif terdokumentasi dalam bentuk karya-karya publikasi seperti buku, dokumen-dokumen, dan berbagai sumber lainnya.

Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan berbagai unsur seperti dana, daya dan data yang dimiliki oleh peneliti, bobot permasalahan, serta berbagai batasan lain yang harus dihadapi peneliti dalam membuat penelitian yang dilakukan. Metode ini beserta teknik yang digunakan merupakan metode terbaik yang dipakai dari hasil pertimbangan yang dilakukan guna menghasilkan suatu karya tulis yang mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

**Pembangunan Masyarakat di Perbatasan NTT-RTDL**

Perbatasan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Timor Leste terletak di tiga kabupaten yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut hasil Kajian Kemenetrian PU melalui Kajian kebijakan Strategis Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan tahun 2004 bahwa Kebanyakan daerah yang dilalui sebagai daerah lintas batas adalah berada pada kabupaten belu yakni berada di kecamatan Tasifeto Timur.

Saat ini berbagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah dirdirikan di sepanjang wilayah perbatasan, hal ini merupakan upaya pembangunan masyarakat daerah perbatasan yang telah diusahakan oleh pemerintah saat ini terutama dalam masa kpeemrenitahan presiden Jokowi dengan nawa citanya.

Pembangunan masyarakat di daerah perbatasan NTT-RTDL ini diarahkan ke arah pembangunan ekonomi terutama difungsikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong ekspor sehingga daerah perbatasan dianggap sebagai titik pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong ekspor ke negara lain.

**Kondisi Saat ini**

Pada saat ini, kondisi penanganan kawasan perbatasan, termasuk diantaranya berbagai pulau terluar masih belum terintegrasi dengan baik dimana tiap-tiap kementerian cenderung berjalan berdasarkan kepentingannya masing-masing dan mengabaikan keterpaduan.

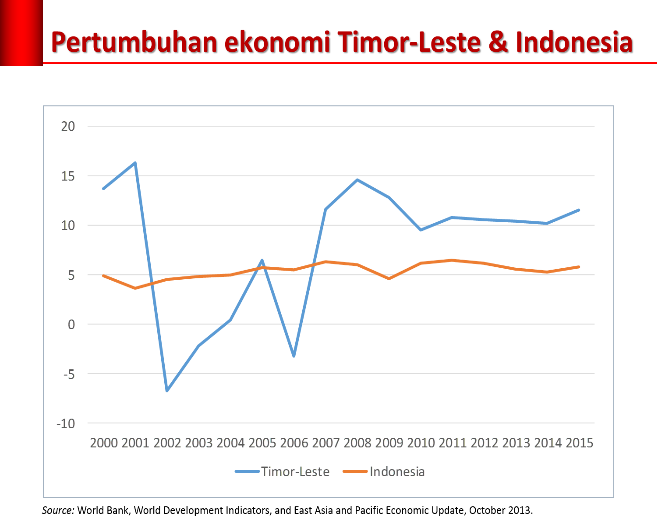
Dilihat dari kondisi alamnya, kondisi alam NTT tidaklah terlalu baik. NTT tidak memiliki sumber daya alam yang tinggi yang mampu dimanfaatkan warganya guna meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing.

Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat di dalamnya hidup dalam garis kemiskinan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah serta tinggal di daerah yang terisolir serta tertinggal. Mata pencaharian utama masyarakat yang berada di daerah ini adalah petani lahan kering. Namun satu hal yang lebih baik adalah bahwa kondisi seperti ini di wilayah NTT masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi masyarakat Timor Leste di perbatasan yang sama.

**Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan**

Pemerintah saat ini melakukan percepatan dalam membangun kawasan perbatasan secara terpadu di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, karena sebagai mana diketahui sebagaimana dikemukakan dalam Kawasan Perbatasan Negara dengan Negara Timor Leste di NTT merupakan wilayah Perbatasan Negara yang relatif baru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah merupakan salah satu dari propinsi di Indonesia.

Kondisi wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur, secara umum masih belum berkembang dengan sarana dan prasarananya yang masih bersifat darurat dan sementara. Meskipun demikian relatif lebih baik dibandingkan dengan di wilayah Timor Leste. Di wilayah perbatasan ini sudah berlangsung kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste dengan nilai jual yang relatif lebih tinggi, sehingga muncul berbagai aktivitas illegal dalam perdagangan tersebut

Gambar I

Sumber: dalam faisalbasri.com/2014/01/05/timor-leste-sudah-menyusul-indonesia

Melalui kerjasama antar pihak baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, upaya pembangunan daerah perbatasan diprioritaskan untuk berfokus pada bidang keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada bidang keamanan, sebgaimama dikemukakan dalam tabloid Tempo.co. 2016. Mendagri Percepat Pembangunan di Perbatasan NTT-Timor Leste yang di download pada tanggal 17 Juli 2017 bahwa daerah perbatasan NTT-Timor Leste sangat rawan terhadap kejahatan lintas negara, terutama perdagangan manusia dan juga *illegal fishing*.

Selain itu, permasalahan batas wilayah yang belum disepakati antara Indonesia dan Timor Leste juga berpotensi menjadi ancaman keamanan yang dapat mengganggu hubungan antara kedua negara. Sedangkan, dalam bidang ekonomi, pembangunan difokuskan ke arah kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menciptakan kondisi agar roda perekonomian masyarakat dapat bergerak dengan lebih cepat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan wilayah ekonomi serta pembangunan infrastruktur.

**Tabel I**

**Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kabupaten/Kota** | **Kota** | **Kecamatan** | **Desa** |
| 1. | Kabupaten Alor | Kalabahi | 17 | - |
| 2. | Kabupaten Belu | Atambua | 24 | 196 |
| 3. | Kabupaten Ende | Ende | 40 | - |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | Larantuka | 19 | 21 |
| 5. | Kabupaten Kupang | Oelamasi | 24 | 218 |
| 6. | Kabupaten Lembata | Lewoleba | 9 | 144 |
| 7. | Kabupaten Malaka | Betun | 12 | 127 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | Ruteng | 9 | 132 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo | 10 | - |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | Borong | 6 | 104 |
| 11. | Kabupaten Ngada | Bajawa | 9 | - |
| 12. | Kabupaten Nagekeo | Mbay | 7 | 90 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | Baa | 10 | - |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | Seba | 6 | - |
| 15. | Kabupaten Sikka | Maumere | 21 | 147 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak | 12 | - |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka | 11 | 95 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul | 5 | 43 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu | 22 | - |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe | 32 | - |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu | 9 | - |
| 22. | Kota Kupang | - | 6 | 51 |

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2016

**Upaya TNI melalui Kowil**

Undang-Undang RI No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara pasal 4 menyebutkan bahwa “pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. TNI dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai alat pertahanan Negara, senantiasa siap siaga untuk menyelenggarakan salah satu fungsinya sebagai pemulih terhadap segala bentuk ancaman termasuk salah satunya adalah melaksanakan tugas penanggulangan bencana.

Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa tugas pokok TNI melaksanakan OMSP yang salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan. Dengan demikian kekuatan dan kemampuan TNI yang dimiliki semata-mata adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan.

Artinya TNI kini tidak hanya menjadi instrument pertahanan bangsa yang berfungsi untuk melawan aggressor semata, namun juga TNI dapat pula diterjunkan guna menghadapi hal-hal lain di luar perang, misalnya sebagaimana dikemukakan diatas dalam penanganan dampak bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan operasi lain yang dapat menggunakan kekuatan TNI apabila diperlukan.

Dinamika dunia internasional yang diwarnai oleh globalisasi mengakibatkan berbagai isu internasional muncul yang memerlukan penanganan khusus karena sudah tidak lagi bersifat mainstream. Hubungan-hubungan internasional yang ada saat ini sudah tidak lagi bersifat konfliktual melainkan bersifat *cooperational* atau saling bekerjasama antar negara. Oleh karena itu kemudian pada kenyataannya di lapangan, fungsi tentara sebagai tenaga utama pertahanan suatu negara dapat berubah fungsi guna menghadapi ancaman-ancaman nir-militer akibat perkembangan zaman dan globalisasi tersebut.

Selaras dengan hal tersebut, isu internasional dan globalisasi yang terjadi memiliki pengaruh hingga ke daerah. Hal ini disebabkan karena berbagai kesepakatan dalam perjanjian tingkat tinggi yang dilakukan oleh negara akan berpengaruh ke dalam kehidupan masyarakat hingga bagian terkecil. Hal ini disebabkan karena kesepakatan internasional yang telah dibuat akan menjadi penentu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersepakat. Pelanggaran atas hal tersebut akan mengganggu hubungan diplomatis yang selama ini terjalin.

Ancaman yang diakibatkan oleh globalisasi pun terdiri atas berbagai bentuk ancaman, baik ancaman yang bersifat fisik maupun bersifat non-fisik. Ancaman yang bersifat fisik diantaranya adalah munculnya berbagai kelompok yang terorganisisr secara internasional guna melakukan kejahatan lintas batas negara. Kejahatan yang dilakukan diantara lain yakni seperti terorisme, perdagangan manusia internasional, penyelundupan, peredaran narkotika, illegal logging, illegal fishing, dan lain sebagainya.

Sedangkan ancaman yang bersifat non-fisik diantaranya dapat berupa pengaruh media global dalam membangun opini publik, pengaruh teknologi pada kehidupan masyarakat yang melenakan manusia, degradasi moral generasi muda, terkikisnya nilai-nilai nasionalisme di dalam diri masyarakat, dan ancaman lainnya yang menjadi ancaman bagi keamanan dan pertahanan bangsa dan negara.

Pada tingkat daerah, TNI melaksanakan fungsinya sebagai instrumen pertahanan negara melalui Komando Wilayah (Kowil) yang ada di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Kowil menjadi garda terdepan bagi masyarakat yang menjadi pelindung dan penanggung jawab atas keamanan dan pertahanan mereka, utamanya dalam konteks ini bagi Kowil yang berada di daerah perbatasan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas tersebut, sebagaimana dalam [www.tniad.mil.id/index.php/2016/07/satgas-pamtas-ri-rdtl-yonif-raider-321-kostrad-terima-kunjungan-upf-timor-leste/](http://www.tniad.mil.id/index.php/2016/07/satgas-pamtas-ri-rdtl-yonif-raider-321-kostrad-terima-kunjungan-upf-timor-leste/) yang di download tanggl 20 JUli 2017 bahwa aparat Kowil yang pernah ditunjuk untuk melaksanakan tugas di kawasan perbatasan tersebut antara lain Komando Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna (GT) Kostrad yang bermarkas di Kelurahan Eban Kec Miomaffo Barat, TTU, NTT. Pelaksanaan pengawasan perbatasan saat ini antara Indonesia dan Timor Leste tergolong kondusif, terbukti dari saling kunjung-mengunjungi yang dilakukan oleh kedua belah pihak aparat Pamtas. Adanya tukar informasi dalam jalinan menjaga keamanan di kawasan perbatasan ini terus berjalan. Artinya bahwa Selain menjaga keamanan negara, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat Kowil sebagaimana dikemukakan dalam indonesianmilitary.com/2016/03/tni-membakar-motor-illegal-akan-dikirim.html yang didownload pada tanggal 2 November 2017 sering pula ikut berperan mencegah maraknya barang selundupan yang masuk mau pun keluar negara. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh aparat TNI di daerah penjagaan perbatasan Indonesia-Timor Leste ini yang berhasil

Upaya ini mampu meningkatkan kerjasama di wilayah perbatasan dan mungkin di bidang lain yang dapat meningkatkan hubungan aparat dan hubungan masyarakat di sepanjang garis perbatasan kedua negara.

Selanjutnya Kesenjangan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terutama terletak pada masalah ekonomi. TNI dalam hal ini Komando kewilayahan telah terlibat dalam pembangunan Infrastruktur dan sarana fasilitas pemerintah lainnya melalui program Bhakti TNI yang tentunya berhubungan dengan tugas pokok TNI yakni menjaga kedaulatan negara.

Dengan demikian aktivitas prajurit telah mendorong pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan lainnya. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menyatakan bahwa penyebaran gelar satuan TNI pasti harus memberikan dampak pada perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Begitu ada satuan TNI pasti secara perlahan ekonomi di daerah itu herus berkembang.

Membangun infrastruktur fisik di kawasan perbatasan NKRI-RDTL ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan tingkat perekonomian dan taraf kesejahteraan masyarakat perbatasan dan juga di sisi lain akan mempermudah mobilisasi TNI dalam tugasnya yang jauh dari daerah yang berpenduduk.

Jika infrastruktur selesai akan sangat membantu TNI dalam menjaga siatuasi dan kondisi dari ancaman baik itu penyelundupan. Dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan TNI, masyarakat di perbatasan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mereka merasa diperhatikan dan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Segala upaya yang telah dilakukan oleh TNI, diharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga ikut mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan.

**Urgensi Bersinerg**i.

Sinergi merupakan upaya bersama menyatukan kekuatan demi tercapainya tujuan bersama. Dengan bersinergi maka berbagai sumber daya yang tersebar di masing-masing entitas dapat digabungkan dan diarahkan menuju ke arah bersama yang ditetapkan sehingga akan mewujudkan tujuan bersama sebagaimana yang telah diharapkan sebelumnya.

Pembangunan saat ini di negara Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Bappenas. 2010 pada <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/raker-iii-presiden-mendorong-sinergi-pusat-daerah-untuk-percepatan-pembangunan-daerah> yang di download pada tanggl 16 Agustus 2017 berkaitan dengan akselerasi pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan, pada saat ini masih terfokus di pulau jawa. Hal ini terjadi sejak awal masa kemerdekaan hingga saat ini.

Berbagai upaya telah dilakukan sejak orde baru hingga reformasi guna menciptakan kondisi pembangunan yang merata diantaranya adalah melalui transmigrasi dan penyebaran serta penempatan tenaga SDM berkualitas di berbagai bidang ke berbagai daerah di Indonesia, namun masih belum memberikan hasil yang sigifikan bagi pemerataan pembangunan, termasuk diantaranya pembangunan yang terjadi di daerah perbatasan.

Munculnya kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada paham desentralisasi membawa manfaat positif dan negatif bagi perkembangan pembangunan yang terjadi. Pada satu sisi, kebijakan Otonomi Daerah akan menguntungkan daerah masing-masing sebab secara wewenang, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri yang berada di wilayah mereka guna memanfaatkannya untuk masyarakat di wilayah tersebut (wewenang kelola). Namun, penerapan kebijakan ini di sisi lain akan merugikan pembangunan negara secara integral sebab di sisi lain muncul ketimpangan dalam pembangunan yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan satu daerah dengan daerah lain dalam mengembangkan potensinya.

Daerah yang memiliki sumberdaya yang tinggi tidak akan khawatir sebab mereka dapat mengandalkan hasil kekayaan alam guna menunjang pembangunan yang dilakukan, namun bagi daerah yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, maka hal tersebut akan menyulitkan proses pembangunan yang terjadi.

Hal ini berkaitan pula dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang tersedia di daerah. Khususnya di daerah perbatasan, Sumber Daya Manusia yang tersedia terbatas jumlahya dan minim dimana SDM yang berkualitas banyak yang pergi meninggalkan daerahnya dan tinggal di kota besar, di ibu kota atau bahkan di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan di satu sisi versus rasa nasionalisme di sisi lain. Keterpaksaan dalam hal mmenuhi kebutuahn ekonomi membuat banyak SDM berkualitas di daerah terpaksa tidak dapat membangun daerahnya sendiri dan kebanyskan pergi untuk membangun daerah orang lain yang lebih menjanjikan kesejahteraan bagi mereka.

Dalam hal sinergi, Pemda sebagai yang bertanggung jawab dalam penanganan pembangunan daerah memerlukan bantuan dari semua pihak termasuk TNI melalui kowil. Sinergi diperlukan agar tercipta persatuan dan kesatuan pembangunan terutama di daerah perbatasan NTT-RTDL. Sinergi menjadi pengikat berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, yakni pembangunan yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Dalam upaya bersinergi, setiap pihak yang berkolaborasi dapat melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan dan bidang mereka masing-masing. Misalnya saja TNI dalam bidang menjaga keamanan perbatasan, Pemerintah Daerah dalam hal mengkoordinasikan aksi dan berbagai kebijakan, Kementerian PU dan Kemkominfo serta Kemenhub melalui dinas-dinas di daerah dalam upaya pembangunan sarana dan prasarana dan juga keterlibatan pihak lain seperti Kementerian UKM dan Koperasi serta Perusahaan Swasta dalam proses pembangunan ekonomi baik berupa perlatihan UMKM amupun dalam hal investasi.

Urgensi sinergi menjadi sangat penting demi pembangunan rakyat dan pencapaian kesejahteraan. Apabila sinergi tidak dilakukan maka akan membawa dampak buruk bagi masyarakat, yakni terpecahnya arah pembangunan dan semua pihak akan kembali berjalan sendiri-sendiri menghabiskan berbagai sumber daya yang dimiliki dengan penggunaan yang tidak efektif dan tidak efisien.

**Kondisi yang diharapkan Ketika Sinergi Terlaksana**

Ketika sinergi terlaksana, utamanya antara Pemerintah melalui Pemda dan TNI melalui Kowil, maka diharapkan terciptanya akselerasi pembangunan melalui hal-hal Terbentuknya berbagai sarana prasarana serta fasilitas umum bagi masyarakat, terutama yang menunjang pembangunan dan keterhubungan masyarakat dengan membangun sarana transportasi dan komunikasi sehingga masyarakat di perbatasan dapat meningkatkan potensi diri dan perekonomian mereka masing-masing.

Terwujudnya satu visi terpadu yang memadukan seluruh program-program kerja yang berkaitan dengan pengawasan dan pembangunan daerah perbatasan NTT-RDTL hasil menggabungkan berbagai *roadmap* yang dimiliki oleh masing-masing lembaga sehingga pembangunan yanhg terjadi akan semakin fokus dan lebih cepat.

Menghadirkan masyarakat sebagai unsur pendukung bagi keamanan dan pertahanan di daerah perbatasan. Demi menunjang pembangunan, masyarakat juga dapat menjadi unsur bagi keamanan daerah perbatasan. Cara yang dapat dilakukan masyarakat misalnya menjadi informan atas kejahatan lintas batas yang terjadi sehingga ancaman yang hadir tidak akan mengganggu proses pembangunan yang berlangsung.

Munculnya rasa saling memiliki dari setiap unsur baik masyarakat, pemerintah maupun TNI yang bertugas dengan landasan utama nasionalisme dan semangat kebangsaan serta bela negara sehingga pembangunan yang dilakukan akan muncul atas semangat tersebut dan meminimalisir terjadinya berbagai tindakan kecurangan misalnya seperti korupsi dalam pembangunan.

Telah jelas dan tercantum secara legal-formal mengenai berbagai dokumen tentang batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste sehingga tidak ada lagi bibit-bibit sengketa yang dapat mengganggu hubungan diplomatis yang terjadi.

Meningkatnya kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat perbatasan melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, serta perekonomian. Diharapkan sinergi yang terjadi dapat dimaksimalkan melalui pembangunan fasilitas akademik seperti sekolah, ketersediaan pengajar dan pendidik, ketersediaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan beserta para petugas medis yang lebih banyak dan lebih berkompeten, serta ketersediaan lapangan pekerjaan dan atau kemudahan dalam mengkondusifkan iklim usaha.

Kawasan perbatasan negara menjadi representasi bagi keseluruhan wilayah negara. Berbicara perbatasan tidak terlepas dari berbicara tentang kedaulatan negara. Begitu pentingnya perbatasan membuat pemerintah harus menaruh perhatian yang besar. Hal itu diakibatkan begitu strategisnya perbatasan terhadap berbagai hal yang dapat mempengaruhi kehidupan di suatu negara atau wilayah. Menjaga perbatasan dengan baik, akan membawa dampak positif terhadap suatu wilayah. sehingga penampilan daerah perbatasan haruslah dibuat secantik dan seindah mungkin agar membuat geliat pariwisata meningkat serta mengangkat martabat dan kehormatan bangsa di mata internasional.

Terbentuknya berbagai kerjasama diplomatik antara dua negara yang berbatasan, lebih khusus lagi kerjasama antara dua daerah yang saling berbatasan, misalnya melalui *sister city*. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan akan membawa manfaat bagi kedua daerah khususnya dan bagi hubungan diplomatik kedua negara pada umumnya.

**Langkah-langkah Pembangunan yang Diharapkan**

Pembuatan Master Plan bersama antara Pemda dengan TNI dan dengan stakeholder lain pada umumnya sehingga muncul koordinasi terpadu pada satu komando pengambil kebijakan.

Dengan adanya master plan tersebut maka koordinasi antara berbagai lembaga dan wewenang masing-masing dapat lebih terkendali dan terarah sehingga pembangunan akan lebih fokus dan akselerasi pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Prioritas Pembangunan sarana dan prasarana berbentuk infrastruktur berupa jalan untuk mengatur keterhubungan antar wilayah sehingga mempercepat kegiatan perekonomian.

Pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, sebab hal tersebut akan mempercepat laju kegiatan perekonomian yang terjadi di daerah perbatasan.

Menggabungkan kekuatan rakyat dan TNI di perbatasan sebagai perisai utama dalam menangkal setiap bentuk ancaman pertahanan dan keamanan. Masyarakat dapat memberikan sumbangsihnya dalam mendukung pembangunan melalui tindakan menangkal ancaman keamanan dimana kegiatannya misalnya dapat berupa pelaporan akan suatu tindakan atau aksi mencurigakan lintas perbatasan (menjadi informan bagi aparat kowil yang bertugas).

Menghadirkan semangat kebangsaan dalam diri masyarakat perbatasan agar merasa bangga dengan NKRI dan merasakan bahwa pemerintah bersama mereka.

Dengan menghadirkan semangat tersebut maka masyarakat akan merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah sehingga semangat nasionalismenya kembali muncul dalam proses akselerasi pembangunan.

Mempercepat pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional serta membangun satuan TNI yang cukup untuk dipadukan dengan kekuatan nir-militer setempat dalam rangka menjaga wilayah perbatasan dari segala bentuk ancaman.

Pendeklarasian garis batas yang jelas buukan hanya dapat meminimalissisr potensi sengketa diplomatik antara kedua negara namun juga dapat membantu kegiatan TNI yang bertugas guna melaksanakan tugas dengan lebih jelas dan terarah. Aparat di lapangan akan lebih mudah terbantu dalam menjaga kemanan dan pertahana wilayah perbatasan dari segala ancaman yang muncul apabila batas-batas wilayah yang ditentukan sudah ditetapkan dengan jelas.

Mengembangkan SDM dan membongkar keterbelakangan melalui upaya percepatan pembangunan dalam bentuk pendirian berbagai fasilitas umum vital di daerah perbatasan NTT-Timor Leste.

Pembangunan fasilitas vital seperti Rumah Sakit, Sekolah, dan wilayah komersial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masya-rakat di perbatasan serta dapat mengangkat status masyarakat yang saat ini terbelakang dan terisolir menjadi masyarakat yang berwawasan tinggi dan memiliki kepercayaan diri (*confidence building measure*) dalam menghadapi dampak globalisasi yang juga turut berefek di daerah perbatasan.

Menjadikan wilayah perbatasan sebagai etalase negara atau beranda depan bukan sebagai halaman belakang negara.

Sebagai suatu negara beradulat, wilayah perbatasan sepatutnya memperoleh perhatian khusus utamanya bagi proses akselerasi pembangunan. Sebab wilayah perbatasan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan mkisalnya saja potensi pariwisata. Negara akan dipandang baik apabila pembangunan daerah perbatasannya baik karena wilayah perbatasan dapat menajdi representasi dari negara di mata dunia internasional.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama bilateral antara dua negara yang berbatasan dalam berbagai bentuk misal *sister city.*

Berbagai bentuk kerjasama sebagai bentuk sinergi yang dilakukan akan membawa manfaat diantaranya adalah meningkatkan hubungan diplomatik yang lebih erat, proses kerjasama yang semakin terbuka di berbagai bidang, serta meminimalisir konflik sehingga mempermudah tugas dan kinerja dari Pemda serta TNI sendiri karena pada dasarnya kerjasama semacam *sister city* yang sudah baik dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dimana pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pemandu jalan bagi berlangsungnya kerjasama yang terjadi.

**Kesimpulan**

Kawasan perbatasan negara merupakan kawasan strategis dan beranda terdepan Negara. Karena itu kawasan ini harus dibeangun, berbagai regulasi telah mengatur bagaimana kawasan ini harus dikelola.

Namun yang terpenting dalam membangun kawasan perbatasan seperti halnya di Provinsi NTT yang berbatasan secara langsung dengan RDTL adalah sinergi, atau kerjasama dan kolaborasi sehingga dapat memepercepat pembangunan sarana infrastruktur, ekonomi dan terjaminnya keamanan kewilayahan.

Sinergi tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Aparat Kowil dalam hal ini Kodam, Korem, dan Kodim melalui berbagai kegiatan yang secara konstitusional dapat disinierhikean seperti halnya melibatkan Kowil dalam perencanaan pembangunan, mengkaitkan kegiatan KOwil seperti halnya Bhakti TNI, TMMD dalam kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat di kawasan perbatasan.

Sehingga pada akhirnya pembangunan dilakukan dengan menggabungkan kewenangan dan tugas pokok fungsi setiap lembaga, pihak, stakeholder, dan sumber daya lainnya ke dalam suatu rencana sistemik utama yang diajalankan melalui satu koordinasi terpusat guna mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan.

Hal ini lah yang disebut sebagai suatu sinergi. Pemda dan TNI melalui Kowil memiliki perannya tersendiri, namun gabungan dari peran tersebut itulah yang membuat akselerasi pembangunan dapat tercapai.

**Daftar Pustaka**

Departemen Pertahanan, 2008, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan*;

Hadi Sabari, Yunus. 2001. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Hildebrand, ME & Grindle, MS 1997, „*Building sustainable capacity in the public sector what can be done?‟ in MS, Grindle (Ed),Getting good government: capacity building in the publicsectors of developing countries*, Harvard University Press

Muhammad Solikin. 2011. *Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan Negara*. [http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com/muhammadsolikin/strategi%20pembangunan-kawasan-perbatasan-menuju-beranda-depan-negara_550a65a1813311490eb1e59f)

Kementerian PU, 2009 *Bahan-bahan/informasi dari beberapa studi Direktorat Jenderal Penataan Ruang*

Kurniadi, Dendy. 2009. *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Semarang: Onsoed.

Moeldoko. 2010. *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan (Tinjuan dari Prespektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia).* Jakarta.

Mohammad, Yayan Yani. 2008. *Pengaman Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung.

Mabes TNI AD (2007), *Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial No. 201.05-111116 PI : Ter-01.a tahun 2007*.

Mabes TNI (2004), *Buku Petunjuk Lapangan tentang OMSP, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/364/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004.*

Pusterad (2004), *Buku Petunjuk Lapangan tentang Komando Distrik Militer, Surat Keputusan Danpusterad Nomor Skep/25/IV/2004 Tanggal 29 April 2004.*

Pusat Kajian Strategis, 2006, *Penyusunan Kebijakan dan Strategi PSPU dalam Mendukung Pengem-bangan Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terpencil serta Terisolir Wilayah Barat Indonesia*;

Sutisna, dkk. *“Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia,” dalam Ludiro Madu (ed). 2010 . Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, permasalahan, dan pilihan kebijakan*. Yokyakarta: Graha Ilmu.